

Volume 18 Nomor 1, 2024

P-ISSN: 1979-1712, E-ISSN: 2829-0615

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Karakteristik Pemerintah Daerah dan Transparansi LKPD: Studi Empiris pada Sulawesi Selatan

¹ Nurul Izzah Mahyuddin, ² Mediaty, ⁿ Abdul Rahman¹ Departemen Akuntansi, Universitas Hasanuddin, Indonesia. E-mail: nurulizzahmahyuddin@gmail.com² Departemen Akuntansi, Universitas Hasanuddin, Indonesia. E-mail: mediaty@unhas.ac.idⁿ Departemen Akuntansi, Universitas Hasanuddin, Indonesia. E-mail: abdurrahmansalamak@gmail.com

Abstract: *This study examines the factors influencing the level of disclosure in local government financial statements (LKPD) among districts and municipalities in South Sulawesi Province. The variables analyzed include total assets, number of government agencies (SKPD), audit findings, fiscal independence, legislative size, education level, population, and community welfare. The study employs secondary LKPD data from 2019–2021, using purposive sampling to obtain 72 observations. Panel data regression is used to analyze the relationships among variables. The results show that total assets, number of SKPD, and community welfare have a positive and significant effect on disclosure levels. In contrast, audit findings, fiscal independence, legislative size, education level, and population do not significantly influence disclosure. These findings indicate that fiscal capacity and organizational complexity play essential roles in enhancing transparency in local government financial reporting.*

Keyword: *LKPD Disclosure Level, Regional Assets, Number of SKPD, Number of Audit Findings, Self-Reliance Ratio, Population Size, Welfare.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) pada kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Variabel yang diuji meliputi total aset, jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), temuan audit, kemandirian keuangan daerah, ukuran legislatif, tingkat pendidikan, jumlah penduduk, dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Penelitian menggunakan data sekunder LKPD tahun 2019–2021 dengan metode purposive sampling sehingga diperoleh 72 observasi. Analisis dilakukan menggunakan regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa total aset, jumlah SKPD, dan tingkat kesejahteraan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Sementara itu, temuan audit, kemandirian keuangan, ukuran legislatif, tingkat pendidikan, dan jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan. Temuan ini menegaskan bahwa karakteristik kapasitas fiskal dan kompleksitas organisasi merupakan faktor penting dalam mendorong transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Kata kunci: Tingkat Pengungkapan LKPD; Aset Daerah; Jumlah SKPD; Jumlah Temuan Audit; Rasio Kemandirian; Jumlah Populasi; Kesejahteraan.

1. Pendahuluan

UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian menjadi UU No. 32 Tahun 2014 menandai dimulainya penerapan otonomi daerah di Indonesia. Dalam otonomi daerah, pemerintah pusat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada pemerintah daerah, dan pemerintah daerah diberi kewenangan untuk memperoleh serta mengelola dana

sesuai tanggung jawabnya. Penerimaan dana beserta penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan. Untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan anggaran selama satu periode, pemerintah daerah menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan ini disajikan sebagai bentuk informasi bagi pihak yang membutuhkan, seperti stakeholder dan pihak di luar pemerintahan, serta sebagai dasar pengambilan keputusan di bidang ekonomi, politik, dan sosial.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit laporan keuangan yang disusun sesuai SAP dan kemudian disampaikan kepada DPR/DPRD dan masyarakat. Untuk menghasilkan pengungkapan yang berkualitas, pemerintah mengatur penyusunan laporan keuangan melalui Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Paragraf 53 peraturan tersebut menyatakan bahwa laporan keuangan harus memuat informasi lengkap yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi tersebut dapat ditempatkan pada halaman utama (on the face) atau pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). CaLK memiliki peranan penting untuk mencegah kesalahpahaman dalam membaca laporan serta mendukung transparansi keuangan. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 juga mengatur bahwa CaLK disajikan secara sistematis. Halaman utama (on the face) yang dimaksud meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Setiap pos pada laporan tersebut harus memiliki referensi silang dengan informasi terkait dalam CaLK. Minimum pengungkapan yang disyaratkan oleh standar adalah pengungkapan wajib (Yulianingtyas, 2010). Dalam kenyataannya, tingkat pengungkapan LKPD terhadap PSAP masih tergolong rendah. Beberapa hasil pengukuran menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum sepenuhnya mengungkapkan item-item pengungkapan wajib dalam laporan keuangan. Padahal, tingkat pengungkapan merupakan faktor penting dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas untuk menciptakan pemerintahan yang bersih (Pandansari, 2016).

Keterbatasan informasi yang tersedia serta variasi faktor yang memengaruhi pengungkapan laporan keuangan daerah menunjukkan perlunya penelitian lanjutan. Penelitian ini penting untuk menilai tingkat kepatuhan pemerintah daerah terhadap PP No. 71 Tahun 2010 serta mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini menggunakan enam variabel yaitu total aset, jumlah SKPD, temuan audit, rasio kemandirian, jumlah populasi, dan menambahkan variabel kesejahteraan yang masih jarang diteliti. Periode LKPD yang digunakan adalah LKPD tahun 2019–2021 yang telah diaudit, sehingga mampu memberikan gambaran terbaru mengenai kondisi pemerintah daerah. Penelitian ini juga menilai tingkat pengungkapan keseluruhan sesuai kriteria PSAP menggunakan data LKPD Kabupaten/Kota di seluruh Provinsi Sulawesi Selatan. Penambahan variabel kesejahteraan dilakukan karena tingkat kesejahteraan merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi prioritas pengelolaan keuangan daerah. Jika tingkat kesejahteraan rendah, pemerintah daerah cenderung berfokus pada pembangunan dan penyediaan infrastruktur sehingga mendorong pengungkapan yang lebih besar. Sebaliknya, pada tingkat kesejahteraan yang tinggi, tuntutan pelayanan publik semakin meningkat dan mendorong pemerintah daerah untuk menyajikan pengungkapan yang lebih baik. Selain itu, tingkat kesejahteraan yang tinggi juga memicu tuntutan politik terhadap kualitas pelayanan yang diberikan pemerintah.

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Landasan Teori

2.1.1. *Stewardship Theory* dalam Pemerintahan

Stewardship theory menjelaskan bahwa aparaturnya pemerintah bertindak sebagai pelayan (*steward*) yang memiliki tanggung jawab untuk mengelola sumber daya publik secara efisien dan akuntabel demi kepentingan masyarakat. Teori ini menekankan orientasi pelayanan publik, transparansi, serta akuntabilitas dalam penyajian laporan keuangan pemerintah (Davis et al., 1997). Dalam konteks pemerintahan daerah, teori ini relevan karena menuntut aparaturnya untuk menyajikan informasi keuangan yang dapat dipercaya sehingga publik dapat menilai kinerja pemerintah daerah.

2.1.2. Laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD)

LKPD merupakan laporan yang disusun pemerintah daerah untuk menyampaikan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan dalam satu periode anggaran. LKPD wajib disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk diaudit. Tujuan utama LKPD adalah menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, serta kinerja pemerintah daerah (Pernyataan SAP No. 01).

2.1.3. Standar Akuntansi Pemerintah

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan pedoman penyusunan laporan keuangan pemerintah berbasis akrual atau kas menuju akrual, sesuai amanat PP No. 71 Tahun 2010. SAP bertujuan menghasilkan laporan yang dapat dibandingkan, andal, dan relevan untuk mendukung transparansi pengelolaan keuangan publik. SAP juga menjadi dasar penilaian kualitas LKPD oleh BPK melalui audit tahunan.

2.1.4. Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Pengungkapan LKPD adalah sejauh mana pemerintah daerah menyajikan informasi secara lengkap sesuai ketentuan SAP agar memenuhi kebutuhan para pengguna laporan keuangan. Pengungkapan yang memadai meningkatkan akuntabilitas dan menunjukkan komitmen pemerintah daerah terhadap transparansi. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa faktor keuangan dan kelembagaan pemerintah daerah dapat mempengaruhi tingkat pengungkapan LKPD (Fridana & Asandimitra, 2020).

2.1.5. Total asset

Total aset menggambarkan jumlah seluruh sumber daya ekonomi yang dikuasai pemerintah daerah. Pemerintah daerah dengan aset besar cenderung memiliki aktivitas operasional yang lebih kompleks sehingga membutuhkan pengungkapan yang lebih lengkap dalam LKPD. Hal ini sejalan dengan teori bahwa ukuran organisasi memengaruhi luasnya informasi yang disajikan (Firdaus, 2020).

2.1.6. Jumlah SKPD

Jumlah SKPD mencerminkan struktur organisasi pemerintah daerah. Semakin banyak SKPD, semakin besar kompleksitas pengelolaan keuangan sehingga dapat mendorong pemerintah untuk menyusun pengungkapan yang lebih detail. Pemerintah daerah dengan unit kerja lebih banyak juga biasanya melakukan lebih banyak program, sehingga informasi yang diungkapkan cenderung lebih beragam (Pratiwi, 2022).

2.1.7. Jumlah Temuan Audit

Jumlah temuan audit merupakan jumlah permasalahan yang ditemukan BPK dalam pemeriksaan LKPD. Temuan yang tinggi dapat menggambarkan lemahnya sistem pengendalian internal atau ketidakpatuhan terhadap regulasi. Pemerintah daerah dengan temuan audit besar umumnya terdorong untuk memperbaiki kualitas pelaporan keuangan dan meningkatkan pengungkapan pada LKPD berikutnya (Dewi, 2022).

2.1.8. Rasio Kemandirian

Rasio kemandirian menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan operasionalnya menggunakan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi rasio ini, semakin besar kemandirian daerah dalam pengelolaan fiskal. Pemerintah daerah dengan tingkat kemandirian tinggi biasanya memiliki kepatuhan yang lebih baik terhadap transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan (Purboyo & Wicaksono, 2019).

2.1.9. Jumlah Populasi

Jumlah populasi menggambarkan besarnya masyarakat yang menerima layanan pemerintah daerah. Daerah yang memiliki penduduk lebih banyak biasanya menghadapi tuntutan transparansi lebih besar dari masyarakat karena pelayanan publik yang diberikan juga lebih kompleks (Yolanda & Tasman, 2020).

2.1.10. Kesejahteraan

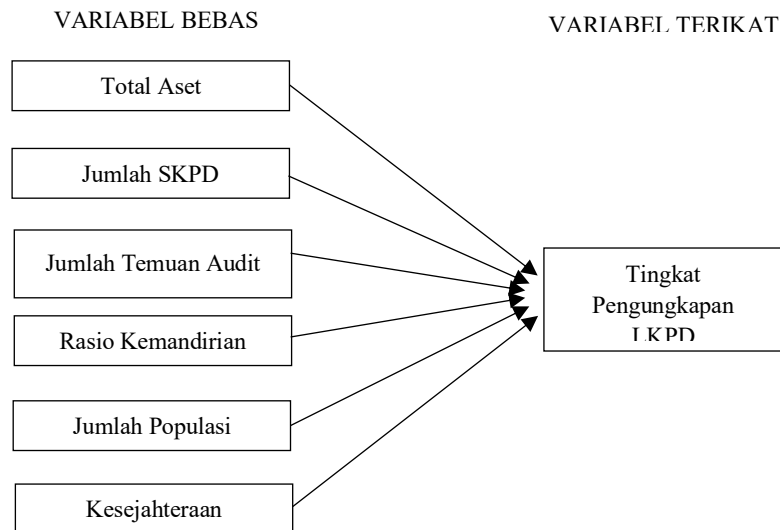
Kesejahteraan masyarakat mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan publik dan mengelola anggaran daerah. Indikator kesejahteraan, seperti tingkat pendidikan atau pendapatan per kapita, sering digunakan untuk menilai kualitas pelayanan. Daerah dengan tingkat kesejahteraan lebih tinggi cenderung memiliki tata kelola keuangan yang lebih baik dan pengungkapan LKPD yang lebih memadai (Sulistiyowati et al., 2022).

2.2. Penelitian Terdahulu

Berbagai penelitian telah dilakukan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Fridana dan Asandimitra (2020) menyatakan bahwa karakteristik keuangan daerah dapat memengaruhi pengambilan keputusan dalam penyajian laporan keuangan. Penelitian lain seperti Firdaus (2020) dan Dewi (2022) menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah, temuan audit, serta faktor ekonomi memiliki hubungan dengan kualitas dan pengungkapan LKPD. Selain itu, Purboyo dan Wicaksono (2019) serta Yolanda dan Tasman (2020) menemukan bahwa karakteristik fiskal daerah seperti rasio kemandirian dan persepsi masyarakat dapat memengaruhi transparansi keuangan. Temuan-temuan tersebut menjadi rujukan dalam menyusun model penelitian.

2.3. Kerangka Konseptual

Penulis akan meneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan daerah. Berikut adalah kerangka konseptual yang menggambarkan penelitian dan hubungan antar variabel yang digunakan dalam penelitian ini:



Gambar 1. Kerangka Konseptual

2.4. Hipotesis Penelitian

2.4.1. Pengaruh Total Asset Terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD

Total aset mencerminkan besarnya sumber daya yang dikelola pemerintah daerah. Pemerintah dengan aset yang lebih besar memiliki aktivitas yang lebih kompleks sehingga membutuhkan pengungkapan yang lebih luas untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas. Penelitian Khasanah dan Rahardjo (2014) serta Patrick (2010) menunjukkan bahwa ukuran pemerintah yang diukur melalui total aset berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan. Simbolon dan Kurniawan (2018) serta Putri dan Arza (2019) juga menemukan hasil serupa. Berdasarkan hal tersebut, hipotesis pertama dirumuskan sebagai berikut:

H1: Total aset berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan LKPD.

2.4.2. Pengaruh Jumlah SKPD Terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD

Jumlah SKPD mencerminkan tingkat diferensiasi fungsi dalam pemerintah daerah. Semakin banyak SKPD, semakin besar informasi yang harus dikelola dan diungkapkan sesuai ketentuan SAP. Damanpour (1991) dan Patrick (2007) menyatakan bahwa diferensiasi organisasi berhubungan dengan meningkatnya inovasi dan kebutuhan pengungkapan. Temuan Lestavira Finakesti et al. (2022) dan Ridwan serta Yahya (2020) memperkuat bahwa jumlah SKPD berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Dengan demikian, hipotesis kedua ditetapkan sebagai berikut:

H2: Jumlah SKPD berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan LKPD.

2.4.3. Pengaruh Jumlah Temuan Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD

Temuan audit BPK menunjukkan adanya ketidaksesuaian pengendalian internal atau pelanggaran regulasi dalam pengelolaan keuangan daerah (Khasanah, 2014). Semakin banyak temuan audit, semakin besar dorongan untuk melakukan perbaikan melalui peningkatan pengungkapan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Penelitian Ridwan dan Yahya (2020) serta Amaliah dan Haryanto (2019) membuktikan bahwa jumlah temuan audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan LKPD. Berdasarkan hal tersebut, hipotesis berikut diajukan:

H3: Jumlah temuan audit berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan LKPD.

2.4.4. Pengaruh Rasio Kemandirian Terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD

Rasio kemandirian menggambarkan kemampuan pemerintah daerah membiayai aktivitasnya tanpa bergantung pada pemerintah pusat. Daerah dengan tingkat kemandirian tinggi cenderung menghadapi tuntutan publik yang lebih besar terhadap transparansi, sehingga mendorong peningkatan pengungkapan laporan keuangan (Dwirandra, 2008). Penelitian Simbolon dan Kurniawan (2018) serta Finakesti et al. (2022) mendukung bahwa rasio kemandirian berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Oleh karena itu, dirumuskan hipotesis berikut:

H4: Rasio kemandirian berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan LKPD.

2.4.5. Pengaruh Jumlah Populasi Terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD

Jumlah populasi menggambarkan tingkat kompleksitas pelayanan publik. Daerah dengan populasi besar menghadapi tuntutan transparansi yang lebih tinggi, sehingga cenderung melakukan pengungkapan lebih luas (Hilmi dan Martani, 2012). Penelitian Budiarto dan Indarti (2019) serta Andriani et al. (2019) menunjukkan bahwa jumlah populasi berpengaruh positif terhadap pengungkapan LKPD. Maka hipotesis kelima dinyatakan sebagai berikut:

H5: Jumlah populasi berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan LKPD.

2.4.6. Pengaruh Kesejahteraan Terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD

Kesejahteraan masyarakat yang tinggi biasanya diikuti peningkatan tuntutan terhadap kualitas pelayanan dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Kesejahteraan dapat diukur menggunakan PDRB per kapita (Nor et al., 2019). Penelitian Aswar et al. (2022) serta Martani et al. (2014) menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat berhubungan dengan luasnya pengungkapan LKPD. Berdasarkan hal tersebut, hipotesis keenam adalah:

H6: Kesejahteraan berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan LKPD.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis faktor faktor pendukung yang mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan total asset, jumlah SKPD, jumlah temuan audit, rasio kemandirian, jumlah populasi, dan tingkat kesejahteraan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif. Penelitian ini akan menggunakan purposive sampling yang dimana dalam pemilihan sampel akan dilakukan berdasarkan kriteria-kriteria yang dibuat oleh peneliti. Adapun kriteria yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan periode 2019-2021 yang telah diaudit oleh BPK.
2. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tersebut memiliki data non keuangan seperti jumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD), jumlah populasi, dan PDRB perkapita

Tabel 1. Pemilihan Sampel Penelitian

No	Kriteria Sampel	Jumlah Kabupaten/Kota
1	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan periode 2019-2021	24
2	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan yang mempublikasikan laporan keuangannya pada periode 2019-2021	22
3	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan yang melaporkan jumlah SKPD pada periode 2019-2021	16
4	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan yang bukan merupakan data Ekstrim periode 2019-2021	14
5	Jumlah sampel keseluruhan yang memenuhi standar penelitian pada periode 2019 hingga 2021	14

Sumber: Data telah diolah

Jenis data yang digunakan adalah jenis data sekunder yang diperoleh berupa laporan keuangan pemerintah daerah periode 2019-2021 melalui website resmi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau www.bpk.go.id, jumlah SKPD melalui website resmi pemerintah daerah, dan jumlah populasi serta PDRB perkapita tiap daerah melalui website Badan Pusat Statistika Provinsi Sulawesi Selatan atau sulsel.bps.go.id. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan teknik dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang mengumpulkan dan menganalisis dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, maupun elektronik.

Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis variabel, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini berfokus pada total asset (X1), jumlah SKPD (X2), jumlah temuan audit (X3), rasio kemandirian (X4), jumlah populasi (X5), dan tingkat kesejahteraan (X6). Sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah (Y).

Varuabel Dependen

Tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang dimaksud ialah berupa perbandingan antara pengungkapan yang telah disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan pengungkapan yang seharusnya disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berlaku. Hasil perbandingan ini akan memberikan gambaran tentang besarnya tingkat pengungkapan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dibandingkan dengan pengungkapan wajib yang

seharusnya disajikan dalam CaLK menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010. Oleh karena itu, penelitian ini dapat diukur dengan menggunakan rumus :

$$DISC = \frac{\text{Pengungkapan dalam LKPD}}{\text{Pengungkapan dalam PSAP}}$$

Pengukuran tingkat pengungkapan dalam penelitian ini akan menggunakan sistem skoring, dimana sistem skoring merupakan system pemberian skor pada daftar checklist pengungkapan yaitu 1 jika ada dalam laporan keuangan pemerintah daerah dan 0 jika tidak ada. Datar checklist pengungkapan sendiri dibuat berdasarkan pada pengungkapan yang diwajibkan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) yang merupakan bagian dari PP Nomor 71 Tahun 2010 yang berlaku yaitu PSAP 01, PSAP 02, PSAP 03, PSAP 04, PSAP 05, PSAP 06, PSAP 07, PSAP 08, PSAP 09, PSAP 11, PSAP 12.

Variabel Independen

Total Aset

Aset adalah salah satu sumber daya yang digunakan oleh suatu entitas untuk menjalankan kegiatan operasionalnya. Sumber daya dan fasilitas yang memadai diperlukan untuk dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Pemerintah dengan total aset yang semakin besar dan kompleks membutuhkan pengelolaan aset yang baik, sehingga diperlukan pengungkapan yang lebih banyak terkait dengan pemeliharaan dan pengelolaan aset. Total aset dipilih karena nilainya lebih stabil dibandingkan dengan kapitalisasi pasar dan penjualan. Total asset digunakan juga dalam penelitian Sumarjo (2010), Hilmi (2010), dan Liestiani (2012).

$$ASSET = \text{Total Aset}$$

Jumlah SKPD

Berdasarkan PP No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah perangkat daerah yang mengelola anggaran, kekayaan, dan barang, sehingga wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar standar akuntansi yang diselenggarakannya. Penelitian ini akan menggunakan total seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terdapat dalam suatu daerah sebagai pengukur jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah. Ukuran ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Yulianingtyas, 2010; dan Hilmi, 2012). Pengukuran jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat diproksikan dengan:

$$SKPD = \text{Jumlah SKPD}$$

Jumlah Temuan Audit

Temuan audit adalah kasus pelanggaran laporan keuangan pemerintah daerah yang ditemukan oleh pihak BPK yang melanggar peraturan perundang-undangan atau standar yang berlaku. Untuk mengukur jumlah temuan audit, penelitian ini menggunakan jumlah temuan audit BPK

atas penyimpangan di pemerintah daerah dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengukuran untuk temuan audit dapat dihitung dengan menggunakan:

$$FIND = \text{Jumlah Temuan Audit}$$

Rasio Kemandirian

Rasio kemandirian keuangan daerah adalah untuk mengevaluasi sejauh mana pemerintah daerah dapat beroperasi tanpa bergantung pada dukungan keuangan dari pemerintah pusat. Untuk mengukur rasio kemandirian suatu daerah dapat dilakukan dengan cara:

$$MANDIRI = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pend. Transfer} + \text{Total Kewajiban}}$$

Jumlah Populasi

Jumlah penduduk dapat digunakan untuk menunjukkan seberapa kompleks suatu wilayah. Permasalahan yang dihadapi semakin kompleks seiring dengan jumlah penduduk, yang berarti lebih banyak informasi yang perlu diungkapkan (Hilmi dan Martani, 2012). Untuk mengukur jumlah populasi dapat dilakukan dengan cara:

$$POPULATION = \text{Jumlah Penduduk}$$

Kesejahteraan

Apabila kesejahteraan semakin tinggi pada suatu wilayah maka secara politik tuntutan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah akan semakin tinggi pula, serta tuntutan transparansi pengelolaan keuangan daerah juga semakin tinggi oleh karena itu tingkat pengungkapan lkpD semakin tinggi dengan semakin meningkatnya kesejahteraan pada masyarakat. Untuk mengukur kesejahteraan suatu daerah dapat dilakukan dengan cara:

$$WELFARE LEVEL = \text{PDRB perkapita}$$

4. Hasil

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten/kota di Sulawesi Selatan periode 2019-2021. Terdapat 24 kabupaten/kota di provinsi Sulawesi selatan pada periode 2019-2021, adapun sampel kabupaten/kota yang digunakan berjumlah 14 kabupaten/kota atau sebanyak 42 sampel laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) yaitu LKPD Kab.Bulukumba, Kab.Enrekang, Kab.Gowa, Kab.Jeneponto, Kab.Kepulauan Selayar, Kab.Luu Timur, Kab.Maros, Kab.Pangkep, Kab.Pinrang, Kab.Sidrap, Kab.Soppeng, Kab.Toraja Utara, Kota Palopo, Kota Parepare. Kabupaten/kota tersebut sudah memenuhi kriteria purposive sampling yang sesuai dengan kebutuhan data penelitian. Data tersebut diperoleh melalui situs resmi dan sumber lainnya yang memiliki hubungan dengan data yang dibutuhkan.

4.2. Analisis Statistik Deskriptif

Pada pengujian Statistik Deskriptif dapat memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap suatu data sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami. Data Statistik Deskriptif ini dapat dilihat dari nilai Rata-Ratanya (Mean), Standar Deviasinya, Variannya, Maksimumnya, Minimumnya, Sumnya, Rangnya, Kurtosisnya, Dan Skewnessnya atas variabel-variabel Penelitian (Ghozali, 2016;19). Berikut hasil analisis deskriptif dari variabel-variabel dalam penelitian ini.

Tabel 2. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics							
	N	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation	
Total Aset	42	1.91	4.25	113.00	2.6905	.61019	
SKPD	42	33.00	54.00	1833.00	43.6429	6.21886	
Jumlah Temuan Audit	42	4.00	25.00	476.00	11.3333	4.92216	
Rasio Kemandirian	42	.00	.30	5.98	.1424	.06140	
Jumlah Populasi	42	134.00	773.00	13533.00	322.2143	155.60935	
Kesejahteraan	42	25.70	79.19	1946.55	46.3464	15.27915	
Tingkat Pengungkapan	42	60.29	89.71	3245.59	77.2760	6.68966	
Valid N (listwise)	42						
	N	Range	Variance	Skewness	Kurtosis		
					Std.		
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Error	Statistic	Std. Error
Total Aset	42	2.34	.372	.888	.365	-.119	.717
SKPD	42	21.00	38.674	-.013	.365	-.787	.717
Jumlah Temuan Audit	42	21.00	24.228	1.137	.365	1.115	.717
Rasio Kemandirian	42	.30	.004	.434	.365	.399	.717
Jumlah Populasi	42	639.00	24214.270	1.509	.365	2.826	.717
Kesejahteraan	42	53.49	233.452	.706	.365	-.143	.717
Tingkat Pengungkapan	42	29.42	44.752	-.124	.365	.087	.717
Valid N (listwise)	42						

Berdasarkan tabel diatas dapat terlihat bahwa Variabel Total Aset (X1), dari data tersebut dapat kita deskripsikan bahwa nilai minimum dari dari X1 adalah sebesar 1.91 berada di kab.Enrekang (2019), sedangkan nilai maksimum dari variabel ini adalah 4.25 yaitu kab.Gowa (2021), atau dengan range sebesar 2.34. untuk rata-rata total asset kabupaten di Sulawesi selatan adalah sebesar 2.69, untuk standar deviasinya sebesar 0.61, kemudian skewness dari variabel ini sebesar 0.89, dan untuk nilai kurtosisnya sebesar -0.12. Pada Variabel SKPD (X2), dari data tersebut dapat kita deskripsikan bahwa nilai minimum dari dari X2 adalah sebesar 33.00 berada di Kota Perepare, selanjutnya nilai maksimum dari variabel ini adalah 54.00 berada di Kab.Gowa dan Kab.Tana Toraja (2019), untuk rangnya sebesar 21.00. untuk rata-rata jumlah SKPD di sulsel adalah sebesar 43.64, untuk standar deviasinya sebesar 6.22, kemudian skewness dari variabel ini sebesar -0.01, dan untuk nilai kurtosisnya sebesar -0.79. Pada Variabel Jumlah Temuan Audit (X3) dari data tersebut dapat kita deskripsikan bahwa nilai minimum dari dari X3 adalah sebesar 4.00 berada di Kab.Maros (2021), selanjutnya nilai maksimum dari variabel ini adalah 25.00 berada di Kab.Jeneponto (2019), untuk rangnya sebesar 21.00. untuk rata-rata dari jumlah temuan audit di sulsel adalah sebesar 11.34, untuk standar deviasinya sebesar 4.92, kemudian skewness dari variabel ini sebesar 1.14, dan untuk nilai kurtosisnya sebesar 1.12.

Pada Variabel Rasio Kemandirian (X4) dari data tersebut dapat kita deskripsikan bahwa nilai minimum dari X4 adalah sebesar 0.00 berada di Kab.Pinrang (2019) , selanjutnya nilai maksimum dari variabel ini adalah 0.30 berada di Kab.Lutim (2020), sedangkan untuk rangnya sebesar 0.30. untuk rata-rata dari rasio kemandirian di sulsel sebesar 0.14, untuk standar deviasinya sebesar 0.06, kemudian skewness dari variabel ini sebesar 0.43, dan untuk nilai kurtosisnya sebesar 0.40. Pada Variabel Jumlah Populasi (X5) berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa nilai minimum dari X5 adalah sebesar 134 berada di Kab.Selayar (2019), selanjutnya nilai maksimum dari variabel ini adalah 773 berada di Kab.Gowa (2021), untuk rangnya sendiri sebesar 639. untuk rata-rata dari jumlah populasi di sulsel adalah sebesar 322.22, untuk standar deviasinya sebesar 155.61, kemudian skewness dari variabel ini sebesar 1.51, dan untuk nilai kurtosisnya sebesar 2.83. Pada Variabel Kesejahteraan (X6) berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa nilai minimum dari X6 adalah sebesar 25.70 berada di Kab.Jeneponto (2020) , selanjutnya nilai maksimum dari variabel ini adalah 79.19 berada di Kab.Pangkep (2021), untuk rangnya sebesar 53.49. untuk rata-rata dari tingkat kesejahteraan di sulsel adalah sebesar 46.35, untuk standar deviasinya sebesar 15.28, kemudian skewness dari variabel ini sebesar 0.71, dan untuk nilai kurtosisnya sebesar -0.14. Variabel Tingkat Pengungkapan (Y) dari data tersebut dapat kita deskripsikan bahwa nilai minimum dari Y adalah sebesar 60.29 berada di Kab.Pangkep (2021), selanjutnya nilai maksimum dari variabel ini adalah 89.71 berada di Kab.Bulukumba (2020) dan Kab.Gowa (2021), untuk rangnya sebesar 29.42. untuk rata-rata dari tingkat pengungkapan di sulsel adalah sebesar 77.28, untuk standar deviasinya sebesar 6.69, kemudian skewness dari variabel ini sebesar -0.12, dan untuk nilai kurtosisnya sebesar 0.09.

4.3. Uji Normalitas

Uji normalitas berusaha untuk menentukan apakah ada residual terdistribusi normal, residual disruptif, atau regresi model. Data dapat dikatakan normal apabila nilai dari tingkat signifikannya > 0.05 namun apabila nilai dari tingkat signifikannya < 0.05 maka dapat dikatakan data tersebut tidak normal. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode Monte Carlo dengan metode itu penulis mendapatkan hasil uji normalitas sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas

			One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test						
			Y	X1	X2	X3	X4	X5	X6
N			42	42	42	42	42	42	42
Normal	Mean		77.2760	2.6905	43.6429	11.3333	.1424	322.2143	46.3464
Parameters ^{a,b}	Std. Deviation		6.68966	.61019	6.21886	4.92216	.06140	155.60935	15.27915
Most Extreme	Absolute		.089	.165	.091	.154	.104	.153	.155
Differences	Positive		.089	.165	.080	.154	.104	.153	.155
	Negative		-.087	-.105	-.091	-.092	-.072	-.113	-.092
Test Statistic			.089	.165	.091	.154	.104	.153	.155
Asymp. Sig. (2-tailed)			.200 ^{c,d}	.006 ^c	.200 ^{c,d}	.013 ^c	.200 ^{c,d}	.015 ^c	.012 ^c
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.		.858 ^e	.181 ^e	.840 ^e	.247 ^e	.717 ^e	.256 ^e	.242 ^e
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.849	.171	.831	.236	.705	.245	.231
		Upper Bound	.867	.190	.850	.258	.728	.267	.253

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

e. Based on 10000 sampled tables with starting seed 329836257.

Berdasarkan hasil tersebut dapat dilihat bahwa nilai *Sig* Y sebesar 0.858, *Sig* X1 sebesar 0.181, *Sig* X2 sebesar 0.840, *Sig* X3 sebesar 0.247, *Sig* X4 sebesar 0.717, *Sig* X5 sebesar 0.256, *Sig* X6 sebesar 0.242 yang berartikan data tersebut terdistribusi normal dikarenakan hasil dari uji normalitas menunjukkan nilai yang > dari 0.05.

4.4. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui korelasi yang tinggi antar variabel-variabel independen (X) itu ada atau tidak dalam sebuah model regresi. Uji multikolinearitas ini dilakukan dengan melihat besarnya variance invelations factor (VIF) dan tolerance. Jika nilai VIF > 10 dan tolerance < 0,1 berarti terjadi Multikolinearitas dan apabila nilai VIF < 10 dan nilai tolerance > 0,1 berarti tidak terjadi Multikolinearitas. Berikut adalah tabel hasil pengujian multikolinearitas.

Tabel 4. Uji Multikolinearitas

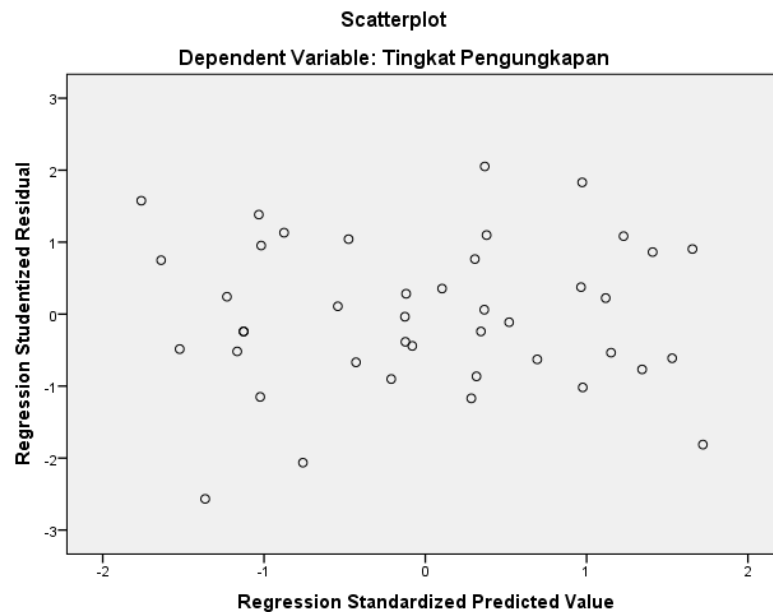
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Collinearity Statistics		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
(Constant)	112.231	7.460		15.045	.000		
Total Aset	-6.477	1.958	-.591	-3.307	.002	.384	2.604
SKPD	-.341	.146	-.317	-2.326	.026	.661	1.513
Jumlah Temuan Audit	-.135	.170	-.099	-.791	.434	.781	1.280
Rasio Kemandirian	33.038	15.929	.303	2.074	.045	.573	1.744
Jumlah Populasi	.028	.007	.640	3.906	.000	.456	2.193
Kesejahteraan	-.317	.066	-.725	-4.837	.000	.546	1.832

a. *Dependent Variable*: Tingkat Pengungkapan

Berdasarkan hasil uji yang dilakukan, diketahui bahwa nilai dari *VIF* & *Tolerance* variabel X1 adalah 2.604 & 0.384, nilai *VIF* & *Tolerance* variabel X2 adalah 1.513 & 0.661, nilai *VIF* & *Tolerance* dari X3 adalah 1.280 & 0.781, nilai *VIF* & *Tolerance* dari X4 1.744 & 0.573, nilai *VIF* & *Tolerance* dari X5 sebesar 2.193 & 0.456, dan nilai *VIF* & *Tolerance* dari X6 adalah 1.832 & 0.546 dari hasil uji yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa nilai *VIF* < 10 dan nilai *Tolerance* > 0,1 yang berarti data tidak terjadi *multikolinieritas*.

4.5. Uji Heteroskedastisitas

Tujuan dari pengujian ini adalah untuk menentukan apakah model regresi menghasilkan ketidaksamaan dalam varians residual dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Jika didalam kasus varians residual dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya tidak berubah, maka dapat dikatakan sebagai heterokedastisitas. Cara untuk mengetahui apakah adanya heterokedastisitas atau tdk adalah dengan cara melihat ada atau tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot. Jika ada pola yang jelas dan titik-titik tersebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka heterokedastisitas tidak terjadi. Berikut adalah hasil uji heteroskedastisitas:

Gambar 2 Grafik Uji *Heteroskedastisitas*

Berdasarkan grafik scatterplot diatas menunjukkan bahwa data tersebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y serta tidak membentuk pola yang jelas maka kesimpulan dari hal tersebut adalah data tidak terjadi Heterokedastisitas.

4.6. Analisis Regresi Linear Data Panel

Analisis regresi linear Data Panel adalah analisis regresi yang dimana digunakan pada struktur data yang merupakan data panel. Data panel sendiri adalah gabungan data cross section dan data time series, dengan kata lain data panel merupakan data dari beberapa objek sama yang diamati dalam periode waktu tertentu. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui hubungan antara variabel independen (X) dan variabel dependen (Y). Dalam hal ini variabel independen terdiri dari total asset (X1), jumlah SKPD (X2), jumlah temuan audit (X3), rasio kemandirian (X4), jumlah populasi (X5), dan tingkat kesejahteraan (X6) dan variabel dependen adalah tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah (Y). Berikut hasil analisis regresi linear data panel dapat dilihat pada tabel:

Tabel 5. Hasil Analisis Resresi Linear Data Panel

<i>Coefficients^a</i>							
<i>Model</i>	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	<i>t</i>	<i>Sig.</i>	<i>Collinearity Statistics</i>	
	<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>			<i>Tolerance</i>	<i>VIF</i>
1 (Constant)	112.231	7.460		15.045	.000		
Total Aset	-6.477	1.958	-.591	-3.307	.002	.384	2.604
SKPD	-.341	.146	-.317	-2.326	.026	.661	1.513
Jumlah Temuan Audit	-.135	.170	-.099	-.791	.434	.781	1.280
Rasio Kemandirian	33.038	15.929	.303	2.074	.045	.573	1.744
Jumlah Populasi	.028	.007	.640	3.906	.000	.456	2.193
Kesejahteraan	-.317	.066	-.725	-4.837	.000	.546	1.832

a. Dependent Variable: Tingkat Pengungkapan

Sumber: Output SPSS 23, Data sekunder telah diolah

Berdasarkan hal tersebut dapat diperoleh persamaan analisis regresi linear data panel sebagai berikut:

$$Y = 112.231 - 6.477X_1 - 0,341X_2 - 0.135X_3 + 33.038X_4 + 0.028X_5 - 0.317X_6$$

Nilai konstanta sebesar 112.231 menunjukkan bahwa ketika seluruh variabel independen bernilai konstan, tingkat pengungkapan LKPD berada pada angka 112.231. Koefisien total aset (X1) sebesar -6.477 berarti setiap kenaikan satu satuan X1 menurunkan tingkat pengungkapan LKPD sebesar 6.477. Koefisien jumlah SKPD (X2) sebesar -0.341 menunjukkan bahwa peningkatan satu satuan X2 akan menurunkan pengungkapan sebesar 0.341. Koefisien jumlah temuan audit (X3) sebesar -0.135 menunjukkan penurunan pengungkapan sebesar 0.135 untuk setiap kenaikan satu satuan X3. Selanjutnya, koefisien rasio kemandirian (X4) sebesar 33.038 menunjukkan bahwa peningkatan satu satuan X4 meningkatkan pengungkapan sebesar 33.038. Koefisien jumlah populasi (X5) sebesar 0.028 menunjukkan peningkatan pengungkapan sebesar 0.028 untuk setiap kenaikan satu satuan X5. Terakhir, koefisien kesejahteraan (X6) sebesar -0.317 menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan X6 menurunkan tingkat pengungkapan LKPD sebesar 0.317.

4.7. Uji Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi pada dasarnya menilai sejauh mana variabel independen dapat menjelaskan variasi dalam variabel dependen. Setiap penambahan satu variabel independen akan menyebabkan peningkatan nilai R². Hasil uji koefisien determinasi R² dapat dilihat pada tabel:

Tabel 6. Hasil Pengujian Koefisien Determinasi				
<i>Model Summary^b</i>				
<i>Model</i>	<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>
1	.756 ^a	.571	.498	4.74147
a. <i>Predictors: (Constant), Kesejahteraan, Total Aset, Jumlah Temuan Audit, SKPD, Rasio Kemandirian, Jumlah Populasi</i>				
b. <i>Dependent Variable: Tingkat Pengungkapan</i>				
Sumber: <i>Output SPSS 23</i> , Data sekunder telah diolah				

Berdasarkan hasil analisa koefisien determinasi (R²) sebesar 0,571 yang artinya variasi naik turunnya nilai Y dijelaskan oleh variabel determinan sebesar 57,1% sisanya sebesar 42,9% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak masuk didalam model. Hal ini menunjukkan bahwa kebaikan model dari penelitian ini cukup tinggi dikarenakan nilainya berada diatas 50%.

5. Pembahasan

Berdasarkan temuan dari penelitian yang telah disampaikan sebelumnya menunjukkan bahwa model yang diusulkan dalam penelitian ini terbukti baik dan dapat diterima berdasarkan bukti empiris. Pada bagian ini penulis akan menjelaskan mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan.

Tabel 7. Hasil Penelitian

Hipotesis	Uraian	Hasil
H1	Pengaruh Total Asset terhadap tingkat pengungkapan LKPD	Diterima
H2	Pengaruh Jumlah SKPD terhadap tingkat pengungkapan LKPD	Diterima
H3	Pengaruh Jumlah Temuan Audit terhadap tingkat pengungkapan LKPD	Ditolak
H4	Pengaruh Rasio Kemandirian terhadap tingkat pengungkapan LKPD	Diterima
H5	Pengaruh Jumlah Populasi terhadap tingkat pengungkapan LKPD	Diterima
H6	Pengaruh Kesejahteraan terhadap tingkat pengungkapan LKPD	Diterima

1. Pengaruh total asset terhadap tingkat pengungkapan LKPD

Berdasarkan hasil uji variabel X1, total aset memiliki nilai t hitung -3.307 dengan signifikansi 0.002, lebih kecil dari $\alpha = 0.05$. Hasil ini menunjukkan bahwa total aset berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD, sehingga hipotesis pertama dapat diterima. Temuan ini sejalan dengan penelitian Syamsuri Rahim, Hamzah Ahmad, Muslim, dan Andi Nursadirah (2020) yang menemukan bahwa semakin besar total aset suatu daerah maka semakin rendah tingkat pengungkapan laporan keuangannya. Hasil tersebut berbeda dengan penelitian Simbolon dan Kurniawan (2018), Putri dan Arza (2019), serta Marliani, Amin, dan Mawardi (2018) yang menyatakan pengaruh positif. Pengaruh negatif ini dapat terjadi karena pemerintah daerah dengan aset besar menghadapi kompleksitas pengelolaan yang tinggi sehingga kesulitan menyajikan informasi secara lengkap dan tepat waktu. Selain itu, pengelolaan aset dalam jumlah besar membutuhkan sumber daya manusia, teknologi, dan anggaran yang lebih besar sehingga keterbatasan sumber daya dapat menjadi hambatan dalam menghasilkan pengungkapan laporan keuangan yang memadai.

2. Pengaruh jumlah SKPD terhadap tingkat pengungkapan LKPD

Dari hasil pengujian variabel X2, yakni jumlah SKPD, terlihat bahwa nilai t hitungnya adalah -2.326 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.026, yang ternyata lebih rendah daripada $\alpha = 0.05$. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis kedua dapat diterima. Penelitian ini menemukan bahwa semakin tinggi jumlah SKPD, akan semakin tinggi pula tingkat pengungkapan LKPD. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Lestavira Finakesti, Siska Aprianti, Bainil Yulina, dan Sri Hartaty (2022), dan M Ridwan dan M Rizal Yahya (2020) yang menyatakan bahwa Jumlah SKPD berpengaruh positif dan signifikan pada tingkat pengungkapan LKPD. Dengan banyaknya jumlah SKPD di dalam suatu pemerintahan dapat menggambarkan seberapa kompleks pemerintahan tersebut dan aktivitas keuangannya juga akan semakin banyak sehingga tuntutan untuk mengungkapkan informasi dalam laporan keuangan juga akan semakin tinggi.

3. Pengaruh jumlah temuan audit terhadap tingkat pengungkapan LKPD

Berdasarkan hasil pengujian variabel X3, jumlah temuan audit memiliki nilai t hitung -0.791 dengan signifikansi 0.434, yang lebih besar dari $\alpha = 0.05$. Hal ini menunjukkan

bahwa hipotesis ketiga ditolak dan jumlah temuan audit tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Temuan ini konsisten dengan penelitian Fikrinah Naopal, Sri Rahayu, dan Siska Priyandani Yudowati (2017) serta Dekeng Setyo Budiarto dan Luki Indarti (2019) yang juga menyatakan bahwa temuan audit tidak memengaruhi tingkat pengungkapan. Tidak signifikannya variabel ini dapat disebabkan oleh pengukuran temuan yang hanya melihat jumlahnya sehingga kurang mencerminkan bobot atau urgensi setiap temuan. Banyak atau sedikitnya temuan tidak selalu menandakan kebutuhan pengungkapan tambahan dalam CaLK, karena pengaruhnya sangat bergantung pada substansi dan tingkat kepentingan temuan tersebut.

4. Pengaruh rasio kemandirian terhadap tingkat pengungkapan LKPD

Berdasarkan hasil pengujian untuk X4 yaitu rasio kemandirian yang memiliki nilai t hitung sebesar 2.074 dengan tingkat signifikan sebesar 0.045 lebih kecil dari $\alpha = 0.05$. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat diterima, artinya rasio kemandirian memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lestavira Finakesti, Siska Aprianti, Bainil Yulina, dan Sri Hartaty (2022) yang menyatakan bahwa Rasio Kemandirian atas Keuangan Daerah mempengaruhi Pengungkapan yang ada dalam LKPD Melakukan pengungkapan LKPD secara lebih mendalam merupakan salah satu praktek yang dilakukan oleh pemerintah daerah ketika mendapatkan otonomi keuangan, sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat atas kontribusinya, baik dalam bentuk pembayaran pajak maupun retribusi lainnya. Dilihat dari perspektif teori stewardship, agen sebagai pelaksana akan berperilaku sesuai dengan tuntutan prinsipalnya. Oleh karena itu, untuk mendapatkan perhatian dari masyarakat sebagai prinsipal, pemerintah daerah sebagai agen berusaha semaksimal mungkin menyampaikan informasi finansial melalui pengungkapan yang lebih transparan, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya.

5. Pengaruh jumlah populasi terhadap tingkat pengungkapan LKPD

Berdasarkan hasil pengujian untuk X5, ditemukan bahwa jumlah populasi yang memiliki nilai t hitung sebesar 3.906 dengan tingkat signifikansi 0.000, lebih kecil dari $\alpha = 0.05$. Kesimpulannya, hipotesis lima dapat diterima, atau dengan kata lain, jumlah populasi memiliki pengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Dekeng Setyo Budiarto dan Luki Indarti (2019), Meri Andriani, Elfritri Santi, dan Rasyidah Mustika (2019), serta Syamsuri Rahim, Hamzah Ahmad, Muslim Muslim, dan Andi Nursadirah (2020), yang juga menunjukkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, kompleksitas tugas pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan juga meningkat, sementara tuntutan terhadap pelayanan pemerintah juga meningkat secara signifikan. Berbagai permintaan jasa yang beragam mendorong pemerintah untuk memberikan penjelasan yang lebih komprehensif, terutama dalam upaya meningkatkan transparansi pengungkapan laporan keuangan.

6. Pengaruh Kesejahteraan terhadap tingkat pengungkapan LKPD

Berdasarkan hasil pengujian untuk X6 yaitu kesejahteraan yang memiliki nilai t hitung sebesar -4.837 dengan tingkat signifikan sebesar 0.000 lebih kecil dari $\alpha = 0.05$. dapat

disimpulkan bahwa hipotesis enam diterima dengan kata lain kesejahteraan yang dihitung dengan PDRB perkapita berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Khoirul Aswar, Alvin Yoga Fanany, Mahendro Sumardjo, Meilda Wiguna, dan Eka Hariyani (2022). Dengan meningkatnya kesejahteraan di suatu daerah akan berimplikasi pada peningkatan tuntutan politik terhadap pelayanan yang disediakan oleh pemerintah. Selain itu, tuntutan untuk transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah juga akan meningkat. Oleh karena itu, tingkat pengungkapan laporan keuangan akan meningkat seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

6. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah di seluruh kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Selatan periode 2019–2021, dapat disimpulkan beberapa hal. Total aset berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD, ditunjukkan oleh nilai t hitung -3.307 dengan signifikansi 0.002 sehingga hipotesis pertama diterima. Jumlah SKPD juga berpengaruh negatif dan signifikan, dengan nilai t hitung -2.326 dan signifikansi 0.026, sehingga hipotesis kedua diterima. Sementara itu, jumlah temuan audit tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD karena memiliki nilai t hitung -0.791 dan signifikansi 0.434, sehingga hipotesis ketiga ditolak. Rasio kemandirian terbukti berpengaruh signifikan, ditunjukkan oleh nilai t hitung 2.074 dengan signifikansi 0.045, sehingga hipotesis keempat diterima. Jumlah populasi juga berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD dengan nilai t hitung 3.906 dan signifikansi 0.000, sehingga hipotesis kelima diterima. Terakhir, variabel kesejahteraan yang diukur melalui PDRB per kapita berpengaruh signifikan dengan nilai t hitung -4.837 dan signifikansi 0.000, sehingga hipotesis keenam diterima.

Daftar Pustaka

- Anggara, E., & Cheisviyanny, C. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(1), 2162-2184.
- Amaliah, E. F., & Haryanto, H. (2019). Analisis faktor-faktor yang memengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2017. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(2).
- Andriani, M., Santi, E., & Mustika, R. (2019). Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah pada kabupaten/kota provinsi sumatera barat tahun anggaran 2014-2016. *Akuntansi dan Manajemen*, 14(1), 1-14.
- Al Ayyuuby, M. (2021). Analisis Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia. Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Agus Tri Basuki., dan Nano Prawoto. (2017). Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis.
- Aswar, K., Fanany, A. Y., Sumardjo, M., Wiguna, M., & Hariyani, E. (2022). Determinant factors on the disclosure level of local government's financial statements in Indonesia. *Public and Municipal Finance*, 11(1), 1-9.

- Budiarto, D. S., & Indarti, L. (2019). Apakah karakteristik pemerintah daerah berpengaruh pada pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah? Riset pada kabupaten di Jawa Tengah. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 12(1).
- Badan Pusat Statistika Sulawesi Selatan. (n.d). <https://sulsel.bps.go.id/subject/12/kependudukan.html>.
- Cohen, S and N Kaimenakis. (2008). An Empirical Investigation of Greek Municipalities' Quality of Financial Reporting. Working paper series.
- Damanpour, F. (1991). Organizational Innovation: Annual Report of Effects of Determinants and Moderators. *Academy of Management Journal*, Vol.34: 555-590.
- Dwirandra. (2008). "Efektivitas Dan Kemandirian Keuangan Daerah Otonom Kabupaten/Kota Di Propinsi Bali Tahun 2002-2006", *Jurnal Ilmiah*. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Udayana, Denpasar.
- Lex, Donaldson & James, H. David. (1991). Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Return. *Australian Journal of Management*, 16(1). 49-64.
- Finakesti, L., Yulina, B., & Hartaty, S. (2022). Determinan Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 6(1), 71-80.
- Febriani, U., & Harahap, J. P. J. (2021). Analisis Determinan Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi di Indonesia. *Regress: Journal of Economics & Management*, 1(1), 9-17.
- Ghozali, Imam (2016) "Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SSS 23", BP UNDIP, Semarang.
- Hilmi, A. Z., & Martani, D. (2012). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi. *Simposium Nasional Akuntansi XV*, 20, 1-26.
- Hilmi, A. Z., & D, Martani. (2012). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi. *Simposium Nasional Akuntansi*, 15: 13-20.
- Halim, Abdul, dan Kusufi, Syam, Muhammad. (2012). *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hidayat, A. 2014. *Penjelasan Metode Analisis Regresi Data Panel*. <https://exsight.id/blog/2022/03/31/perbedaan-regresi-linear-berganda-panel/>
- Halim, Abdul, dan Abdullah, Syukriy. "Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintah Daerah (Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi)". *Jurnal Akuntansi Pemerintahan* Vol. 2 No. 1 pp 53-64. 2007.
- Jones, Rowan. (1992). The Development of Conceptual Frameworks of Accounting for The Public Sector. *Journal Financial Accounting and Management*. Vol. 8: 249-264.
- Khasanah, N. L., & Rahardjo, S. N. (2014). Pengaruh karakteristik, kompleksitas, dan temuan audit terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(2), 864-874.
- Kasijan. (2009). Perbedaan Persepsi Antara Stakeholders Terhadap Dukungan Pejabat Dalam Penerapan SAP, Akuntabilitas Keuangan Dan Transparansi Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Di Kabupaten Kulon Progo). Tesis Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Marliani, M., Amin, M., & Mawardi, M. C. (2018). Pengaruh Karakteristik Pemerintah, Kompleksitas, Dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur). *e_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 7(10).

- Marsella, C. & Aswar, K. (2019). An Investigation of Financial Statement Disclosure in Local Government Financial Statements. *International Journal of Business and Economic Affairs*, 4(6), 273–281.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: Andi
- Martani, Dwi dan Annisa Lestiani. (2012). Disclosure in Local Government Financial Statements: the Case of Indonesia. *Global Review of Accounting and Finance* 3 (1): 67 - 84.
- Martani, D., Nastiti, D., & Wicaksono, P. T. (2014). Disclosure of non-financial information about public services on the official website of local governments in Indonesia. *Journal of Theoretical and Applied Information Technology*, 66(2), 500-512.
- Naopal, F., Rahayu, S., & Yudowati, S. P. (2017). Pengaruh karakteristik daerah, jumlah penduduk, temuan audit, dan opini audit terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. *Assets: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 7(1), 56-68.
- Novia, Siswita; Arza, Fefri Indra; Agustin, Henri. (2015). Studi Kebutuhan Informasi Pengguna Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang (Studi Empiris pada DPRD dan SKPD Kota Padang). *Jurnal WRA*, 3(1), 529-548.
- Nor, W., Hudaya, M., & Novriyandana, R. (2019). Financial statements disclosure on Indonesian local government websites. *Asian Journal of Accounting Research*, 4(1), 112-128.
- Nurlaelah, N. (2018). *Analisis Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan dalam Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Kota Batu* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Putri, W. M., & Arza, F. I. (2019). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(3), 1111-1130.
- Patrrick, Patricia A. (2010). *The Adoption of GASB 34 In Small, Rural, Local Governments*. *J Of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 13 Tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah.
- Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Permada, Romi. (2017). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Pandansari, T. (2016). Tingkat Ketergantungan, Kompleksitas Pemerintah, dan Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 19(3), 463.
- Patrick, P. A. (2007). *The Determinant of Organizational Inovativeness: The Adoption of GASB 34 in Pennsylvania Local Government*. Unpublished Ph.D Dissertation. Pennsylvania: The Pennsylvania State University.
- Rahmayanti, D. 2018. *Determinan Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Di Indonesia*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
- Ridwan, M., & Yahya, M. R. (2020). Pengaruh Tingkat Ketergantungan Daerah, Temuan Audit Bpk, Jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah, Dan Ukuran Legislatif Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 5(3), 429-437.

- Rahim, S., Ahmad, H., Muslim, M., & Nursadirah, A. (2020, October). Disclosure of Local Government Financial Statements in South Sulawesi. In Brawijaya International Conference on Multidisciplinary Sciences and Technology (BICMST 2020) (pp. 1-6). Atlantis Press.
- Raharjo, E. (2007). Teori Agensi dan Teori Stewardship dalam Perspektif Akuntansi. *Ekonomi*, 2(1), 37–46.
- Rahayu, A. (2016). Pengaruh Karakteristik, Kompleksitas dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Sistem Pengendalian Intern sebagai Variabel Moderating (Studi pada LKPD Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan). Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Simbolon, H. A. U., & Kurniawan, C. H. (2018). Pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan di seluruh provinsi Indonesia. *Modus*, 30(1), 54-70.
- Setyaningrum, D., & Syafitri, F. (2012). Analisis pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 9(2), 4.
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Suhardjanto, Djoko., Lesmana, Sigit, Indra. (2010). “Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib di Indonesia”, *Jurnal STIE Bank BDP Jateng*.
- Suripto, Bambang. (1999). Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Luas Pengungkapan Sukarela Dalam Laporan Tahunan. *Symposium Nasional Akuntansi II*.
- Simamora, R., & A, Halim. (2013). Faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan aset pasca pemekaran wilayah dan pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan Pemerisntah di Kab. Tapanuli Selatan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 13(2): 29-43
- Siyoto, S., & Sodik, A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. (Ayub, Ed.). Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang RI No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendahraan Negara
- Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara
- Undang-Undang RI No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Undang-Undang RI No. 28 Tahun 2022 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara
- Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan sosial
- Wibisono, Y. (2005). *Metode statistik*. Gajah Mada University, Yogyakarta.
- Yulianingtyas, R. R. (2010). “Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kepatuhan Pengungkapan Wajib Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”, *Jurnal Akuntansi & Auditing*.
- Yusuf, M. (2010). *Delapan langkah pengelolaan aset daerah menuju pengelolaan keuangan daerah terbaik*. Yogyakarta, Salemba Empat.